

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu pemerintah daerah mempunyai harapan yang besar untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan daerah sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi bisa menjadi jawaban atas harapan pemerintah daerah ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien. Untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah perlu melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang selama ini dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2004) tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pada hakikatnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri yaitu kemandirian daerah. Otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal menimbulkan peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat besar. Pemerintah daerah di haruskan untuk membiayai APBD dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena PAD merupakan sumber pembiayaan terbesar bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu hasil pajak daerah yang memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau disingkat menjadi PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, atau pertambangan (Pasal 77 UU No.28 Tahun 2009).

Pada tanggal 18 Agustus 2009, pemerintah telah mengesahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang secara resmi telah berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Kemunculan UU PDRD tersebut akan menggantikan UU yang lama yaitu UU No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah ini, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah

daerah. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 182 ayat 1 UU PDRD akan dilaksanakan pada 1 Januari 2014.

Dengan berlakunya UU No. 28 tahun 2009, berbagai daerah di Indonesia menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pusat yang dimulai pada 1 Januari 2010 dan secara keseluruhan pada tahun 2014. Maka saat ini sudah tidak ada lagi PBB-P2 yang dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini berarti terdapat perbedaan pada PAD pada periode sebelum pengalihan pengelolaan PBB-P2 dengan periode setelah pengalihan pengelolaan PBB-P2 bagi daerah yang sudah menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat.

Pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sendiri menurut Syarifah (2013) bertujuan untuk meningkatkan *local taxing power* pada kabupaten/kota, seperti :

1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
2. Menambah jenis pajak daerah dan daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
3. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen dan pengaturan pada daerah.

Pengalihan ini sebenarnya dilakukan pemerintah pusat secara bertahap, diantaranya dengan melihat kesiapan masing-masing daerah. Kota Padang dan Kota Bukittinggi sendiri menerima pengalihan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 1.1

Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2011-2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kab./Kota	1	17	105	369
Keterangan	Kota Surabaya	1. Kota Depok 2. Kab. Bogor 3. Kota Palembang 4. Kota Bandar Lampung 5. Kota Gorontalo 6. Kota Medan 7. Kab. Deli Serdang 8. Kota Palu 9. Kota Pekanbaru 10. Kota Balikpapan 11. Kota Samarinda 12. Kota Pontianak 13. Kab. Sidoarjo 14. Kab. Gresik 15. Kota Semarang 16. Kab. Sukoharjo 17. Kota Yogyakarta	1. Kota Banda Aceh 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Way Kanan 5. Kab. Tulang Bawang Barat 6. Kota Metro 7. Kab. Mukomuko 8. Kab. Muaro Jambi 9. Kab. Batang Hari 10. Kota Tanah Datar 11. Kab. Merangin 12. Kota Padang 13. Kab. Belitung Timur 14. Kab. Musi Banyuasin 15. Kota Pangkalpinang 16. Kota Binjai 17. Kab. Serdang Bedagai 18. Kab. Asahan 19. Kab. Batubara 20. Kab. Labuhanbatu Utara 21. Kab. Simalungun 22. Kota Pematangsiantar 23. Kab. Sibolga 24. Kota Tanjungpinang 25. Kota Batam 26. Kab. Indragiri Hulu 27. Kab. Kuantan Singingi 28. Kab. Kampar 29. Kab. Rokan Hulu 30. Kab. Rokan Hilir 31. Kota Dumai 32. Kab. Pelalawan 33. Kab. Siak 34. Provinsi DKI Jakarta 35. Kab. Pandeglang 36. Kota Bandung 37. Kota Tasikmalaya	Sisanya

			38. Kab. Bandung	
			39. Kab. Bandung Barat	
			40. Kota Cimahi	
			41. Kota Banjar	
			42. Kab. Sukabumi	
			43. Kab. Karawang	
			44. Kab. Bekasi	
			45. Kota Bogor	
			46. Kab. Majalengka	
			47. Kota Cirebon	
			48. Kota Bekasi	
			49. Kab. Bantul	
			50. Kab. Sleman	
			51. Kab. Demak	
			52. Kab. Batang	
			53. Kota Rembang	
			54. Kab. Grobogan	
			55. Kab. Semarang	
			56. Kota Tegal	
			57. Kab. Tegal	
			58. Kota Pemalang	
			59. Kota Pekalongan	
			60. Kab. Pekalongan	
			61. Kab. Kudus	
			62. Kab. Banyumas	
			63. Kab. Klaten	
			64. Kab. Wonosobo	
			65. Kab. Temanggung	
			66. Kota Surakarta	
			67. Kab. Cilacap	
			68. Kota Magelang	
			69. Kab. Magelang	
			70. Kab. Purworejo	
			71. Kab. Karanganyar	
			72. Kab. Kebumen	
			73. Kab. Boyolali	
			74. Kota Mojokerto	
			75. Kab. Mojokerto	
			76. Kab. Bojonegoro	
			77. Kab. Tuban	
			78. Kab. Ponorogo	
			79. Kab. Jember	
			80. Kota Kediri	
			81. Kota Malang	
			82. Kab. Pasuruan	
			83. Kota Pasuruan	
			84. Kab. Kediri	
			85. Kota Batu	

			86. Kab. Banyuwangi	
			87. Kota Probolinggo	
			88. Kab. Badung	
			89. Kota Denpasar	
			90. Kab. Jembrana	
			91. Kab. Tabanan	
			92. Kab. Lombok Barat	
			93. Kota Mataram	
			94. Kab. Kubu Raya	
			95. Kota Tarakan	
			96. Kota Bontang	
			97. Kab. Berau	
			98. Kab. Kutai Barat	
			99. Kota Banjarmasin	
			100. Kab. Katingan	
			101. Kab. Gowa	
			102. Kab. Kolaka	
			103. Kota Makassar	
			104. Kab. Mimika	
			105. Kab. Fak Fak	

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak (2012)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Kota Padang merupakan Kota dengan nomor urut 12 yang memperoleh pengalihan penerimaan PBB-P2 dari pemerintah pusat pada tahun 2013, sedangkan Kota Bukittinggi memperoleh pengalihan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi terjadi perubahan dari semenjak PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat hingga pengelolaan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah (dalam penelitian ini diperoleh data dari tahun 2011 s.d 2016). Penulis bermaksud untuk menganalisis pengaruh pengalihan pengelolaan PBB-P2 di Kota Padang dan Kota Bukittinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dengan pengalihan tersebut, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kota Padang dan Kota Bukittinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah

pusat, PBB masuk dalam akun dana bagi hasil, setelah dialihkan menjadi pajak daerah PBB masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah. Ketika PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan skripsi dengan memberi judul **“ANALISIS PENGARUH PENGALIHAN PENGELOLAAN PBB-P2 DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG DAN KOTA BUKITTINGGI”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebelum dan setelah pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ?
2. Bagaimana Perbandingan efektifitas penerimaan PBB-P2 Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebelum dan setelah Pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ?
3. Bagaimana perubahan realisasi penerimaan PAD kota Padang dan Kota Bukittinggi sebelum dan setelah pengalihan tanggung jawab pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke perintah daerah melalui realisasi penerimaannya.
2. Mengetahui pengaruh pengalihan tanggung jawab pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui tingkat efektivitas dan efisiensinya.
3. Mengetahui mengenai perubahan realisasi PAD yang terjadi disebabkan oleh perubahan pengelolaannya dari pajak pusat ke pajak daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti.

Secara ilmiah merupakan penerapan teori dan diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi PBB-P2.

4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang adanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang mendasari penyusunan skripsi ini yang terdiri atas penjelasan tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pajak secara umum, dan pajak bumi dan bangunan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan tipe penelitian, sumber data yang diperoleh, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan peneliti berdasarkan data dan studi kepustakaan yang telah dilakukan penulis sehingga dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini bagi Pemerintah Kota Padang, serta masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

